

## **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TENGAH DINAMIKA NASIONAL: ANALISIS TANTANGAN IMPLEMENTASI AGENDA SDGS DI INDONESIA 2025**

**Chelsea Michaela Beby Mambo<sup>1</sup>, Liliana Elisabeth Siahaan<sup>2</sup>**  
Email: [chelseamambo04@gmail.com](mailto:chelseamambo04@gmail.com)<sup>1</sup>, [lilianaelisabeth13@gmail.com](mailto:lilianaelisabeth13@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Kristen Indonesia**

**Abstrak:** Studi ini mengkaji permasalahan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia pada tahun 2025, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan dinamika nasional. Dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif analitis yang dilengkapi dengan analisis kuantitatif, studi ini menyelidiki pencapaian Indonesia terhadap 139 indikator SDGs, yang telah mencapai 70,22% pada tahun 2025. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat di Asia Tenggara dalam hal pencapaian SDGs, tetapi masih menghadapi tantangan substansial dalam koordinasi lintas sektor, kesenjangan akses ke layanan kesehatan di daerah pedesaan, dan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp14.000 triliun pada tahun 2030. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa metrik, seperti sukuk hijau yang berhasil mengumpulkan \$1,6 miliar pada tahun 2024, kesenjangan kapasitas kelembagaan antara tingkat pusat dan daerah masih menjadi hambatan yang signifikan. Studi ini menggunakan analisis SWOT dan pendekatan keterkaitan untuk memahami keterkaitan SDGs dengan lebih baik, dengan menekankan perlunya menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor komersial, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga akademis. Temuan-temuan tersebut menegaskan perlunya strategi implementasi yang lebih terintegrasi dan adaptif untuk memastikan efektivitas pencapaian target pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan akses layanan jarak jauh, dan optimalisasi pendanaan yang inovatif.

**Kata Kunci:** Sustainable Development Goals (SDGs), Tata Kelola Multilevel, Disparitas Regional, Koordinasi Lintas Sektor, Indonesia Emas 2045.

**Abstract:** *This study examines the issue of implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia by 2025, within the framework of sustainable development and national dynamics. Using analytical descriptive qualitative techniques complemented by quantitative analysis, this study investigates Indonesia's achievement of 139 SDGs indicators, which has reached 70.22% by 2025. Findings show that Indonesia ranks fourth in Southeast Asia in terms of SDGs achievement, but still faces substantial challenges in cross-sector coordination, gaps in access to healthcare in rural areas, and financing needs of IDR 14,000 trillion by 2030. While progress has been made in some metrics, such as green sukuk raising \$1.6 billion by 2024, the institutional capacity gap between the central and local levels remains a significant obstacle. This study uses SWOT analysis and a linkage approach to better understand the interconnectedness of the SDGs, emphasizing the need to create synergies between the government, commercial sector, civil society organizations, and academic institutions. The findings confirm the need for a more integrated and adaptive implementation strategy to ensure the effective achievement of sustainable development targets for a Golden Indonesia 2045, with a focus on strengthening inter-agency coordination, improving remote service access, and optimizing innovative funding.*

**Keywords:** *Sustainable Development Goals (SDGs), Multilevel Governance, Regional Disparities, Cross-Sector Coordination, Golden Indonesia 2045.*

## **PENDAHULUAN**

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan upaya paling serius dari komunitas internasional untuk menyepakati program kerja dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pembangunan di paruh pertama abad ke-21 ini. Seperti yang telah disoroti dalam berbagai kesempatan, yaitu ambisius dalam lingkup tujuannya, komprehensif karena keragaman elemen yang disertakannya, dan universal karena mengharuskan semua negara, kaya dan miskin, untuk melakukan upaya bersama dalam transisi menuju strategi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional. seperti yang telah ditekankan dalam beberapa kesempatan.

Salah satu ciri kunci Agenda 2030 adalah sifatnya yang multi-level dan multi-aktor, yang tidak hanya mengikat pemerintah di semua tingkatan (nasional, provinsi, hingga daerah), tetapi juga menuntut partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan lembaga penelitian (Bappenas, 2023). Di Indonesia, implementasi SDGs menghadapi tantangan unik akibat keragaman geografis, budaya, dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Misalnya, keterlibatan universitas sebagai aktor kunci masih terbatas, padahal peran mereka dalam penelitian kebijakan, inovasi teknologi, dan pendidikan SDGs sangat krusial (Safitri et al., 2022). Survei oleh Kementerian PPN/Bappenas (2021) menunjukkan bahwa hanya 30% pemerintah daerah yang melibatkan perguruan tinggi dalam perencanaan program SDGs, meskipun potensi kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target seperti pendidikan berkualitas (SDG 4) dan inovasi infrastruktur (SDG 9).

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Sebagai agenda pembangunan yang holistik, SDGs memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan institusi akademik (Sachs et al., 2019). Namun, berbagai studi menunjukkan masih adanya tantangan dalam koordinasi lintas sektor serta disparitas kapasitas kelembagaan antara tingkat pusat dan daerah (Wijaya & Glasbergen, 2021). Selain itu, keterbatasan dalam ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi turut mempengaruhi kemampuan pemantauan dan evaluasi capaian SDGs. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengembangan strategi implementasi yang lebih terpadu dan adaptif untuk memastikan efektivitas pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi sangat relevan di Indonesia untuk menangani masalah-masalah terkini seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan dampak urbanisasi yang cepat di tengah transisi menuju Indonesia Emas 2045. berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, meskipun Indonesia telah mencapai 62,5% dari 139 indikator SDGs, tantangan seperti kemiskinan ekstrem yang masih dialami oleh 1,5% penduduk (sekitar 4 juta orang) dan meningkatnya polusi laut akibat sampah plastik (mencapai 7,8 juta ton per tahun) menghambat kemajuan (BPS, 2024).

Krisis iklim, seperti banjir di wilayah pesisir Jakarta dan kebakaran hutan di Kalimantan pada 2024, menegaskan urgensi SDGs, khususnya tujuan 13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan 14 (ekosistem laut). SDGs mendorong solusi terpadu melalui kolaborasi lintas sektor, misalnya melalui pendanaan inovatif seperti sukuk hijau yang mengumpulkan \$1,6 miliar pada 2024 untuk proyek energi terbarukan dan

sanitasi (United Nations in Indonesia, 2024). Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan nasional, seperti Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Indonesia dapat mengatasi masalah terkini seperti ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil dan meningkatkan ketahanan pangan di tengah krisis global, memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ( Bappenas, 2024).

## **METODE**

Untuk menganalisis tantangan implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tahun 2025 dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika nasional, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang diperkaya dengan analisis kuantitatif untuk memverifikasi capaian 139 indikator SDGs, di mana Indonesia telah mencapai 70,22% pada 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari laporan resmi seperti Bappenas, United Nations in Indonesia, Sustainable Development Report 2025, Peraturan Presiden, dan sektor swasta. Studi kasus terhadap program seperti sukuk hijau yang mengumpulkan \$1,6 miliar pada 2024 dan inisiatif ekonomi hijau di daerah seperti Bandung juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan lokal. Analisis data menggunakan metode konten untuk mengidentifikasi tema seperti koordinasi lintas sektor, analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta pendekatan interlinkages untuk memahami keterkaitan antar-tujuan SDGs. Kerangka teoritis berbasis prinsip universalitas, integrasi, dan inklusivitas SDGs, serta teori tata kelola multilevel, digunakan untuk menganalisis dinamika nasional seperti ketimpangan regional, krisis iklim (banjir dan kebakaran hutan), dan kesenjangan pendanaan Rp14.000 triliun hingga 2030. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dan diskusi kelompok terfokus, dengan mematuhi etika penelitian seperti kerahasiaan dan objektivitas. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan tantangan seperti koordinasi antar lembaga yang lemah dan urbanisasi cepat, sekaligus menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat implementasi SDGs menuju Indonesia Emas 2045.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran umum SDGs dan kerangka implementasi di Indonesia**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk 17 tujuan dan target global untuk tahun 2030 yang dideklarasikan oleh negara-negara maju dan berkembang pada Sidang Umum PBB pada bulan September 2015 (Bappenas, 2023). SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan.

SDGs mencakup 17 tujuan dengan 169 target untuk agenda ketercapaian hingga tahun 2030, yang meliputi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Irhamyah, F., 2020). Ketujuh belas tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang

Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; serta (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan merata di seluruh dunia. SDGs diimplementasikan secara holistik, dengan memasukkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam semua aspek pembangunan. Agenda ini juga menyoroti prinsip "Leave No One Behind", yang memastikan bahwa manfaat dari kemajuan menjangkau semua sektor masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai SDGs melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan keberhasilan komitmen global di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Dasar hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Irhamyah, F., 2020).

Di Indonesia, SDGs juga diimplementasikan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral di antara banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor komersial, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan dan peran parlemen yang semakin diakui (Bappenas, 2023). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif dalam implementasi SDG's dibandingkan dengan MDG's sebelumnya.

Kerangka kerja implementasi SDG's di Indonesia juga mencakup adaptasi tujuan global ke dalam konteks nasional dan regional, dengan mempertimbangkan tantangan unik Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai keragaman geografis, sosial, dan ekonomi. Berbagai kementerian dan lembaga pemerintah berkolaborasi untuk menetapkan strategi, inisiatif, dan indikator pencapaian yang selaras dengan target SDG's 2030, namun tetap konsisten dengan rencana pembangunan nasional dan regional yang ada.

### **Tantangan dan implementasi SDG's di Indonesia**

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, dengan beberapa tujuan yang dianggap paling sulit berdasarkan kondisi terkini. Berdasarkan informasi yang tersedia yang paling menjadi tantangan SDGs di Indonesia yaitu SDGs 1, SDGs 3, SDGs 6, SDGs 10, dan SDGs 13.

SDGs 1 bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi sekitar 1,12% pada 2023, tetapi tantangan besar tetap ada di daerah pedesaan dan wilayah 3T, di mana akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih masih terbatas (Badan Pusat Statistik, 2023). Faktor seperti pengangguran, rendahnya keterampilan tenaga kerja, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi memperumit upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah mendorong strategi "Tiga Mesin Ekonomi" untuk mempercepat pertumbuhan inklusif, termasuk bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, tetapi tantangan seperti korupsi dan koordinasi yang buruk antarlembaga menghambat kemajuan (Bappenas, 2023). Program lokal, seperti pemberdayaan masyarakat, memerlukan pendanaan dan jangkauan yang lebih luas untuk mencapai dampak signifikan.

Salah satu kendala yang paling signifikan adalah masih besarnya ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, yang menyebabkan pencapaian target SDG 3 (Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera) tidak merata. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya sumber daya manusia kesehatan, distribusi fasilitas kesehatan yang tidak efisien, dan kurangnya infrastruktur teknologi kesehatan di tingkat daerah. Selain itu, fragmentasi data dan lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Tingginya proporsi pembiayaan mandiri dalam layanan kesehatan dan alokasi anggaran yang tidak efisien juga menjadi hambatan yang signifikan, di mana pemerintah masih menjadi pilar utama pembiayaan sementara sektor swasta dan masyarakat belum berkontribusi secara optimal. Upaya transformasi kesehatan yang dilakukan oleh KEMENKES, seperti penguatan layanan primer dan sistem rujukan, belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan dan tantangan akses di 514 kabupaten/kota.

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) target ke 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, telah diatur oleh Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Inpres ini menekankan pada penguatan pelayanan kesehatan melalui berbagai program transformasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis Kemenkes adalah pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang bertujuan membangun budaya hidup sehat untuk menurunkan beban penyakit dan meningkatkan produktivitas penduduk sebagai modal pembangunan manusia. Integrasi SDGs dalam perencanaan nasional diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga lain serta pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk memastikan efektivitas program di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil yang selama ini mengalami disparitas pelayanan kesehatan.

Dalam SDGs 3, yang menargetkan kesehatan dan kesejahteraan, menjadi tantangan terbesar di Indonesia pada 2025 akibat ketimpangan akses kesehatan, beban ganda penyakit (TBC 385 per 100.000 penduduk, diabetes meningkat), dan dampak bencana iklim seperti banjir 2024 (BPS, 2024; United Nations in Indonesia, 2024). Angka kematian ibu (183 per 100.000 kelahiran) dan kekurangan tenaga medis di daerah 3T, ditambah kesenjangan pendanaan Rp2.000 triliun, menghambat kemajuan (Bappenas, 2024). Namun, implementasi SDG 3 menunjukkan progres dengan investasi \$1,6 miliar untuk 500 puskesmas, cakupan imunisasi 85%, dan platform SATUSEHAT untuk 80 juta penduduk (United Nations in Indonesia, 2024). Kemitraan swasta dan Perpres No. 111/2022 mendukung JKN menjangkau 90% penduduk. Dibandingkan SDG lain, SDG 3 krusial karena mendasari tujuan lain. Untuk maju, Indonesia perlu tingkatkan koordinasi RAD, pelatihan tenaga kesehatan, telemedisin, dan pendanaan inovatif seperti sukuk hijau menuju Indonesia Emas 2045.

SDG 6 berfokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua. Di Indonesia, tantangan utama adalah akses terbatas ke air bersih dan fasilitas sanitasi, terutama di daerah 3T dan komunitas miskin perkotaan, dengan hanya sekitar 67% rumah tangga di wilayah tertinggal memiliki akses ke sanitasi yang memadai (Kementerian PUPR, 2023). Pencemaran air akibat limbah industri dan domestik memperburuk kualitas air, meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan program seperti penyediaan air bersih pedesaan dan

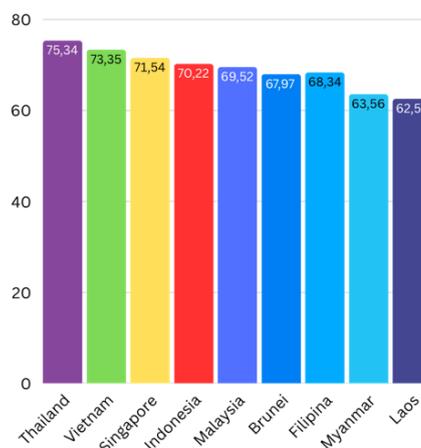
sanitasi berbasis komunitas, sementara inisiatif seperti pembangunan fasilitas sanitasi di sekolah oleh Telkom University di Kalimantan Barat menunjukkan upaya lokal yang positif (Telkom University, 2024). Namun, skala program ini masih kecil dibandingkan kebutuhan nasional, dan tantangan pendanaan serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi terus menjadi hambatan.

SDGs 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesempatan dalam serta antarnegara. Di Indonesia, tantangan utama adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan seperti Jawa dan Jakarta dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, di mana akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih terbatas (Bappenas, 2023). Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari rasio Gini yang masih tinggi di beberapa wilayah, meskipun angka kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,12% pada 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Pemerintah telah meluncurkan program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah 3T, tetapi koordinasi antarlembaga yang lemah dan pendanaan terbatas menghambat efektivitas. Upaya kolaborasi penta helix, seperti yang dilakukan Telkom University melalui program pemberdayaan masyarakat, berupaya memperkuat partisipasi lokal untuk mengatasi ketimpangan ini (Telkom University, 2024).

SDG 13 menyerukan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Indonesia menghadapi tantangan serius berupa deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, serta polusi udara dan air yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Transisi menuju energi terbarukan terhambat oleh ketergantungan pada bahan bakar fosil, biaya teknologi hijau yang tinggi, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Pemerintah telah berkomitmen pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui program seperti REDD+ dan moratorium izin kehutanan, tetapi implementasi sering terhambat oleh kepentingan ekonomi jangka pendek dan rendahnya kesadaran masyarakat (Bappenas, 2023). Inisiatif akademik, seperti inovasi teknologi hijau oleh Telkom University, menjadi langkah positif, namun skala dampaknya masih perlu diperluas (Telkom University, 2024).

### **Perbandingan implementasi SDGs Indonesia sama negara Asia Tenggara**

Tabel 1. Perbandingan skor pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) Asia Tenggara 2025



Sumber: Sustainable Development Report, 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia akan menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara dalam hal pencapaian SDGs, dengan skor 70,22. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan besar, peringkat ini menunjukkan bahwa masih ada peluang bagi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan atau mengungguli negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menurut Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2025, Indonesia mendapat skor 70,22 dari skala 100 untuk pencapaian SDGs. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh di Asia Tenggara, di bawah Thailand (75,34), Vietnam (73,35), Singapura (71,54), Malaysia (69,52), Brunei (67,97), Filipina (68,34), Myanmar (63,56), dan Laos (62,55). Peringkat ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa sejak tahun 2015, masih ada peluang untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Peningkatan skor ini menunjukkan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memasukkan SDG ke dalam kebijakan dan inisiatif nasional. Namun, peringkat yang sebagian besar statis menunjukkan bahwa negara-negara lain di kawasan ini juga membuat kemajuan besar, sehingga persaingan untuk mencapai SDGs tetap sulit.

Menurut laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai dari total target SDGs 2030, yang merupakan pencapaian tertinggi di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun peringkat regional Indonesia berada di tengah-tengah, namun dalam beberapa indikator, Indonesia mengungguli negara-negara lain di kawasan ini. Akan tetapi, masih ada beberapa masalah. Beberapa tujuan SDGs di Indonesia, seperti memberantas kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta melestarikan ekosistem laut dan darat, memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemerintah Indonesia telah menyadari perlunya peningkatan upaya untuk meningkatkan kinerja di bidang-bidang tersebut, seperti mengintegrasikan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perbandingan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan upaya di berbagai sektor untuk mengejar ketertinggalan. Sebagai contoh. Thailand, Vietnam, dan Singapura telah mencapai kemajuan yang lebih cepat dalam beberapa langkah SDGs. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil manfaat dari praktik-praktik terbaik yang digunakan oleh negara-negara tersebut untuk mempercepat kemajuan SDG secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi SDGs di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang luar biasa, meskipun masih ada tantangan yang rumit untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan. Indonesia berada di peringkat keempat di Asia Tenggara dengan tingkat pencapaian 70,22% dari 139 metrik SDG, hanya kalah dari Thailand (75,34%) Vietnam (73,35%), dan Singapura (71,54%). Pencapaian ini menyoroti komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap beberapa tujuan strategis, seperti Peraturan Presiden No. 59/2017 dan penggabungan SDGs dalam RPJMN 2025-2029. Tantangan utama yang dihadapi antara lain koordinasi lintas sektor yang belum optimal, kesenjangan kapasitas kelembagaan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Kesenjangan ini diperparah dengan kesenjangan pendanaan sebesar Rp14.000 triliun pada tahun 2030, meskipun Indonesia telah menunjukkan inovasi dalam pendanaan seperti sukuk hijau yang berhasil mengumpulkan \$1,6 miliar pada tahun 2024. Fragmentasi

data dan lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi juga menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti dalam implementasi SDGs.

Keberhasilan implementasi SDGs di Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor komersial, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga akademik. Peran universitas sebagai aktor penting harus diperkuat, mengingat hanya 30% pemerintah daerah yang melibatkan universitas dalam pengembangan program SDG. Kolaborasi multi-aktor ini sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan ekstrem yang masih dialami oleh 1,5% penduduk, pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik yang mencapai 7,8 juta ton per tahun, dan bencana iklim yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, diperlukan strategi implementasi yang lebih terintegrasi dan fleksibel, dengan penekanan pada peningkatan kolaborasi antarlembaga, optimalisasi pendanaan kreatif, dan perluasan akses layanan di daerah-daerah terpencil. Transisi energi ke energi terbarukan, dengan tujuan menghilangkan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam 15 tahun ke depan, sangat penting untuk mencapai nol emisi pada tahun 2050. Pencapaian rencana pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alcántara-Rubio, L., Valderrama-Hernández, R., Solís-Espallargas, C., & Ruiz-Morales, J. (2022). The implementation of the SDGs in universities: a systematic review. *Environmental Education Research*, 28(11), 1585–1615. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2063798>
- Bappenas. (2023). *Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Indonesia*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Firdaus, M., & Fauzi, A. (2021). Implementasi SDGs di Indonesia: Capaian dan tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 112-130.
- Irhamyah, F. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45-54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Indonesia capai 62,5 persen target SDGs 2030, tertinggi di Asia*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kharrazi, A., Kraines, S., Yu, Y., & Hoekstra, A. Y. (2021). Exploring the efficiency of sustainable development goals using network analysis. *Sustainability Science*, 16(2), 413-428.
- PuTI. (n.d.). *Dukung SDG's 2024, Telkom University Pamerkan Berbagai Inovasi*. Kliping Berita Telkom University. <https://hive.telkomuniversity.ac.id/dukung-sdgs-2024-telkom-university-pamerkan-berbagai-inovasi/>
- Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., lablonovski, G. (2025). *Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century, Sustainable Development Report 2025*. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press. <https://doi.org/10.25546/111909>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. UN General Assembly
- United Nations. (2022). *Voluntary national review (VNR) 2022: Indonesia's progress on SDGs implementation*. UN Department of Economic and Social Affairs